

**ANALISIS PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN
TANGGUNGJAWAB SOSIAL PADA
PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA**

**Budi Chandra dan Teddy Jurnal
Fakultas Ekonomi
Universitas Internasional Batam**

ABSTRACT

This study aims to investigate the impact of good corporate governance and firm characteristics on corporate social responsibility disclosure (CSR). The corporate governance variables used in this research are independent commissioner, individual ownership, government ownership, audit committee. Firm characteristic variable are firm size, profitability, margin of sales, liquidity, leverage, age of firm and audit firm size. This study uses multiple regressions. The samples used are the company listed in Indonesian Stock Exchange (BEI).

Samples from this study using the 211 non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange in the period 2009-2013 and were selected using purposive sampling method. The data used in this study are the financial statements of each company published (www.idx.co.id). The data have been obtained will be tested with panel regressions. SPSS and Eviews applications were used in this study research.

The results of this study indicate that the independent commissioner, individual ownership, government ownership, audit committee, firm size, profitability, age of firm and audit firm size has positive significant impact on corporate social responsibility disclosure. The other variables in this study like margin of sales, liquidity, leverage has no significant impact on corporate social responsibility disclosure.

Keywords: Corporate Governance, Firm Characteristic and Corporate Social Responsibility Disclosure

PENDAHULUAN

Dewasa ini, penerapan dan pemahaman tentang pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia dinilai masih minim (Utama, 2007). Di Indonesia, pengungkapan tanggung jawab sosial masih bersifat suka rela, walaupun pada tahun 2007 pemerintah melalui undang-undang telah mewajibkan, akan tetapi belum ada standar baku yang mengatur “bagaimana” dan “apa” informasi sosial yang harus diungkapkan, hal tersebut memicu perusahaan melaporkan tanggung jawab sosial menggunakan aturan masing-masing pada laporan keuangan sehingga sulit dilacak dan diverifikasi.

Banyak isu sosial yang telah menarik perhatian publik seperti polusi udara, sampah, perusakan sumber daya alam, kualitas dan keamanan dari produk, hak-hak dasar dari para pekerja, hingga kekuasaan politik yang dimiliki oleh segelintir perusahaan menjadi tolak ukur kesuksesan penerapan tanggungjawab sosial di Indonesia.

Tekanan dari publik memaksa perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya terhadap masyarakat. Perusahaan diharapkan untuk bertanggung jawab lebih luas tidak terbatas pada kelompok pemegang saham atau kreditur saja (Grey, Owen & Adam, 1987). Menurut Thomson dan Zakaria (2004) bahwa perusahaan yang gagal dalam

memenuhi kewajiban melaporkan kegiatan sosial dan lingkungan akan menyulitkan mereka secara sosial untuk melangsungkan kegiatan operasionalnya.

Sejak krisis ekonomi tahun 1997, pelaksanaan tata kelola menjadi isu yang penting di Indonesia, terjadinya informasi asimetris yang tinggi antara pihak pemegang saham dan manajemen dalam tata kelola perusahaan. Untuk itu dibutuhkan tata kelola perusahaan yang baik untuk meminimalisir konflik kepentingan, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan cara mengungkapkan informasi tentang tata kelola perusahaan termasuk didalamnya informasi kegiatan sosial.

Menurut Daniri (2006) bahwa pelaksanaan pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia sangat bergantung dengan pucuk pimpinan, artinya kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan tidak selalu serasi dan selaras dengan visi dan misi perusahaan. Jika pimpinan perusahaan memiliki moral yang tinggi, besar kemungkinan pengungkapan tanggung jawab sosial akan semakin tinggi, sebaliknya jika pucuk pimpinan berorientasi ke arah para pemilik saham seperti produktivitas tinggi, saham tinggi, prestasi sendiri, bisa jadi pengungkapan tanggung jawab sosial hanya sekedar formalitas dengan manfaat rendah.

Mekanisme tata kelola dinilai penting dalam mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial, karena beda pucuk pimpinan, maka beda pula visi dan misi perusahaan, sebagai contoh pada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, cenderung enggan mengungkapkan tanggung jawab sosial karena biaya untuk mengungkapkan dinilai lebih mahal daripada manfaat yang dirasakan, lagi pula informasi sosial tersebut hanya dipakai oleh pihak internal perusahaan yaitu keluarga (Ghazali, 2007).

Menurut Said *et al.* (2009) bahwa mekanisme tata kelola perusahaan dinilai sebagai alat yang efektif untuk memastikan bahwa kepentingan dari pemegang saham juga terjaga. Oleh karena itu, perusahaan harus melaporkan kinerja kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan kepada pemangku kepentingan. Pucuk pimpinan harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengendalian yang tepat dan efektif berjalan sebagaimana mestinya termasuk pengendalian resiko, sebagai contoh kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan oleh perusahaan pada sosial dan lingkungan.

Pada akhirnya, peran dari kegiatan tanggung jawab sosial sangat erat hubungannya keberlangsungan suatu perusahaan. Urgensi tanggung jawab sosial ini tidak hanya menjadi perhatian bagi perusahaan, namun juga pemangku kepentingan lainnya seperti pekerja, lingkungan, komunitas masyarakat dan konsumen. Untuk itu dibutuhkan pengungkapan tanggung jawab sosial demi terciptanya keberlangsungan suatu perusahaan (*sustainability*).

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti melihat di Indonesia saat ini, pengungkapan tanggung jawab sosial masih bersifat sukarela dan relatif rendah, masih banyak isu-isu yang dihadapi oleh perusahaan di Indonesia yang berhubungan dengan masalah tanggung jawab sosial. Terdapat hubungan yang erat antara tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam upaya pengungkapan tanggung jawab sosial, dan tentu saja, masih ada beberapa faktor lain yang turut mempengaruhi seperti karakteristik perusahaan yang dilihat dari aspek struktur, kinerja serta mekanisme pasar. Adanya hubungan erat antara pengungkapan tanggung jawab sosial dengan keberlangsungan suatu perusahaan serta pada penelitian sebelumnya tentang pengungkapan sosial atau tanggung jawab sosial juga menunjukkan hasil yang beragam dan menarik untuk dikaji ulang.

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Definisi dari CSRD saat ini begitu beragam. Menurut Schermerhorn (1993) yaitu sebagai pengungkapan suatu kepedulian organisasi dalam bisnis untuk melakukan kegiatan dengan cara bertindak sendiri dalam melayani kepentingan publik secara eksternal.

Hackston dan Milne (1996) menjelaskan bahwa CSR adalah sebuah proses pengkomunikasian dari dampak sosial dan lingkungan yang berasal dari kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara luas.

Hubungan erat antara tata kelola dan CSR dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa adanya teori agensi (*agency theory*) yaitu hubungan yang muncul antara ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut, hal tersebut menciptakan kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pihak (*principal*) maupun pihak agen. Perbedaan kepentingan ini akan meningkatkan informasi asimetris yang memicu konflik agensi antara kedua pihak. Tata kelola seperti ini disebabkan para pucuk pimpinan (*agent*) memiliki informasi tentang perusahaan yang lebih banyak dibanding dengan para pemegang saham (*principal*). Perlu adanya tata kelola yang baik untuk meminimalisir konflik kepentingan dengan cara mengungkapkan semua informasi kepada para pemangku kepentingan dan pemegang saham termasuk informasi tentang tanggung jawab sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Karakteristik perusahaan dapat menjadi tolak ukur dalam mengukur kualitas pengungkapan (Haji, 2013). Secara teoritis dan empiris pada beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa karakteristik perusahaan dapat menjelaskan keberagaman hasil terhadap CSR. Karakteristik perusahaan menjelaskan lebih luas bagaimana variabel tersebut mempengaruhi CSR. Karakteristik perusahaan yang baik dari segi finansial dan ukuran tentu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap CSR, perusahaan-perusahaan tersebut diyakini memiliki sumber daya dan lebih berpengalaman untuk kegiatan sosial jika dibanding dengan perusahaan yang memiliki karakteristik perusahaan yang kurang baik. Terdapat banyak karakteristik perusahaan lainnya yang turut mempengaruhi CSR seperti ukuran perusahaan audit, tingkat likuiditas, tingkat efek pengungkit keuangan, margin kontribusi, umur perusahaan, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas dan variabel lainnya.

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu tentang pengungkapan tanggung jawab sosial yaitu:

1. Pada tahun 1973 penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara kebutuhan untuk mendapatkan dana baru dan status *go-public* terhadap CSR, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perusahaan akan tertarik untuk melakukan CSR untuk menarik peminat investor untuk berinvestasi dana dengan pembiayaan yang lebih murah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan yang termotivasi untuk melakukan *go-public* akan cenderung melakukan CSR yang lebih besar (Choi, 1973).
2. Roberts (1992) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap CSR. Penelitian tersebut menggunakan tiga variabel penting efek pengungkit keuangan, profitabilitas dan ukuran perusahaan serta variabel pendukung lainnya. Peneliti tersebut menjelaskan bahwa pada kondisi kinerja keuangan yang baik akan turut mendorong untuk memberikan pengaruh kepada pihak pucuk manajemen untuk terus berkomitmen dalam menjalankan kegiatan sosial dimasa yang akan datang.
3. Menurut Rosenstein dan Wyatt (1990) bahwa komisaris independen adalah alat untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku dari para manajemen, hal tersebut akan mendorong para manajemen untuk lebih mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih luas.
4. Pincus, Rusbarsky, dan Wong (1989) menjelaskan bahwa keberadaan komisaris independen diluar jajaran direksi akan menciptakan kualitas pengendalian dan

- pengawasan yang lebih baik karena mereka tidak berafiliasi terhadap perusahaan baik secara personal maupun pegawai sehingga keberadaan komisaris independen akan mewakili kepentingan pemegang saham, oleh karena itu semakin tinggi komisaris independen maka pengungkapan tanggung jawab sosial juga akan tinggi pula.
5. Cheng & Courtenay (2006) serta Chen & Jaggi (2000) melakukan penelitian bahwa semakin besar proporsi dari komisaris independen akan berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.
 6. Setyorini dan Ishak (2012) mengembangkan model Roberts (1992) dengan menambahkan variabel discretionary accrual. Setahun kemudian oleh Akrouf dan Othman (2013) menambahkan variabel kultur bisnis, struktur kepemilikan, kepemilikan pemerintah, penetrasi internet untuk mengukur CSR.
 7. Alsaeed (2006) dan Bayoud & Kavanagh (2012) melakukan penelitian mengenai karakteristik perusahaan terhadap CSR. Penelitian tersebut memakai variabel tipe industri dan umur perusahaan. Setahun kemudian Wang *et al.* (2013) melakukan penelitian yang sama dengan menambahkan variabel tingkat partisipasi perusahaan dalam media, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusi dan umur perusahaan.
 8. Huangfang dan Jianguo (2007) melakukan penelitian mengenai tata kelola perusahaan atau dikenal istilah corporate governance terhadap CSR. Penelitian tersebut menggunakan variabel indeks yaitu konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan pemerintah, kepemilikan individual, kepemilikan asing, direksi independen, dualitas CEO, ukuran perusahaan, efek pengungkit keuangan, tingkat pertumbuhan perusahaan, serta ukuran perusahaan audit. Ghazali (2007) juga melakukan penelitian yang sama dengan menambahkan variabel kepemilikan direksi.
 9. Hossain dan Hammami (2009) melakukan penelitian determinan dari CSR. Penelitian tersebut menggunakan variabel yaitu umur perusahaan, ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan dan assets in place. Khelif (2010) melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi CSR. Penelitian tersebut menggunakan variabel yaitu kepemilikan individual, ukuran perusahaan audit, ukuran perusahaan, efek pengungkit keuangan, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan multinasionalitas. Penelitian selanjutnya Khan (2010) mengenai tata kelola manajemen perusahaan menggunakan variabel tambahan yaitu direksi wanita.
 10. Cheng & Courtenay (2006) serta Chen & Jaggi (2000) melakukan penelitian bahwa semakin besar proporsi dari komisaris independen akan berpengaruh signifikan positif terhadap CSR. Teori penelitian tersebut sejalan dengan teori keagenan Fama dan Jansen (1983) yang menyebutkan semakin tinggi proporsi komisaris independen maka CSR juga akan lebih tinggi, serta menciptakan CSR yang lebih berkualitas.
 11. Huafang & Jianguo (2007), Khan (2010), dan Rouf (2011) melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi CSR, dengan menggunakan variabel komisaris independen, hasil pengujian membuktikan bahwa komisaris independen memberikan pengaruh yang signifikan secara positif terhadap CSR. Hasil berbeda dilakukan oleh Khodadadi, Khazami dan Aflatoon (2010), Said *et al.* (2009), Haji (2013) serta Rusmanto *et al.* (2014) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR.
 12. Putranto dan Raharja (2013) perusahaan yang memiliki kepemilikan individual yang besar cenderung memiliki pemangku kepentingan dengan jumlah yang lebih besar serta memiliki keragaman yang tinggi juga, untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan akan informasi, dibutuhkan CSR yang lebih besar. Teori agensi juga menjelaskan bahwa apabila kepemilikan individual besar, maka pengungkapan akan lebih tinggi (Haniffa dan Cooke, 2005).

13. Ghazali (2007), Said *et al.* (2009), Yee *et al.* (2012) dan Haji (2013) membuktikan bahwa kepemilikan pemerintah atas saham perusahaan akan berpengaruh signifikan positif terhadap CSRD. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Huafang & Jianguo (2007), Akrouf & Othman (2013) serta Naser & Hassan (2013) menjelaskan bahwa kepemilikan pemerintah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap CSRD.
14. Ho dan Wong (2001) menjelaskan bahwa komite audit adalah sebuah proses tata kelola untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja manajemen sehingga manajemen dituntut untuk memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan dan turut meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Pendirian komite audit diyakini mampu menekan asimetris informasi, peluang manajemen dalam berbuat curang, dan meningkatkan kualitas dari pengungkapan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi jumlah komite audit maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial juga semakin baik.
15. Hackston dan Milne (1996) yang menyebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan termasuk kegiatan sosial perusahaan, juga semakin banyak pemegang saham yang mempunyai kepentingan agar perusahaan lebih aktif dalam kegiatan sosial.
16. Naser dan Hassan (2013) menekankan bahwa pada perusahaan yang memiliki tingkat margin kontribusi tinggi, mereka percaya bahwa laba yang tinggi adalah signal bahwa perusahaan dalam keadaan performa manajemen yang baik serta memberikan rasa aman kepada investor akan penanaman modal investor, sehingga tidak perlu mempromosikan diri dengan cara mengungkapkan tanggung jawab sosial ke publik, sebaliknya perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah bahkan rugi cenderung akan berusaha menyakinkan para pemegang saham dan publik tentang masa depan perusahaan dengan cara mengungkapkan tanggung jawab sosial
17. Belkaoui dan Karpik (1989) menekankan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat efek pengungkit keuangan yang tinggi cenderung akan mengalami pelanggaran atas kontrak kerjasama yang ada, sehingga pihak pucuk manajemen akan berusaha untuk melaporkan keuntungan bersih yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya termasuk pengurangan biaya untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial.
18. Rouf (2011) bahwa variabel komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap CSRD pada perusahaan. Hasil yang berbeda dilakukan oleh Said *et al.* (2009) melakukan penelitian terhadap CSRD, hasilnya tidak berpengaruh signifikan.
19. Akrouf dan Othman (2013) bahwa pada perusahaan yang besar terjadi biaya keagenan yang juga tinggi, untuk mengurangi biaya keagenan yang tinggi, perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk mengurangi kemungkinan biaya akan dikeluarkan akibat konflik antara pihak manajemen dan pihak stakeholder.
20. Heinze (1976) bahwa variabel profitabilitas merupakan faktor yang membuat pihak manajemen memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk mengambilalih serta mengungkapkan kepada pemegang saham tentang program kegiatan yang lebih ekstensif untuk kegiatan sosial dan lingkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka CSRD perusahaan juga makin tinggi.
21. Margin kontribusi dihitung dengan menggunakan rasio perbandingan antara laba bersih dibandingkan dengan penjualan bersih. Singhvi dan Desai (1971) menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat margin kontribusi akan memotivasi pihak manajemen untuk menyuplai lebih banyak informasi untuk mengilustrasikan kemampuan manajemen untuk memaksimalkan nilai dari pemegang saham

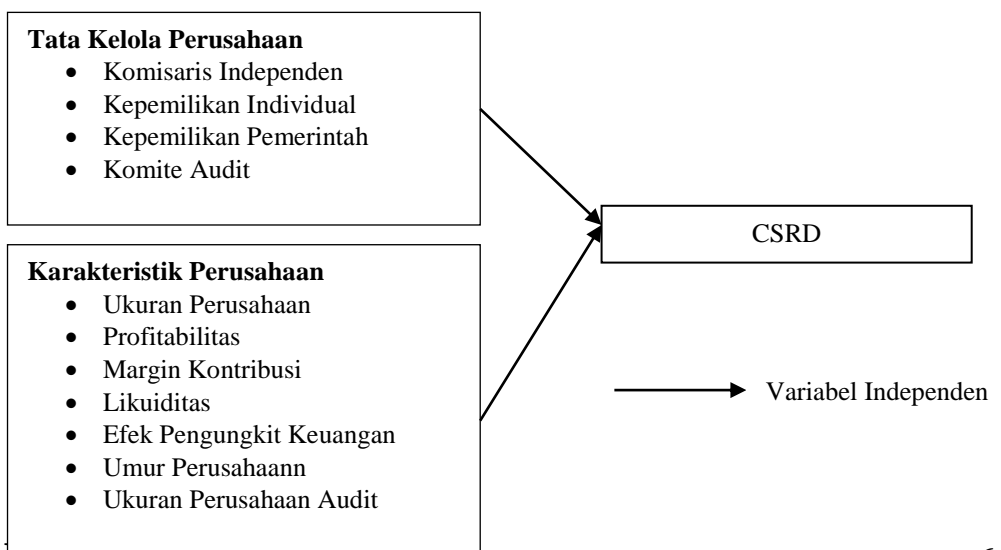
22. Cooke (1989) perusahaan yang memiliki tingkat finansial yang kuat, yang diukur lebih spesifik dengan variabel likuiditas. Semakin tinggi tingkat likuiditas sebuah perusahaan, tingkat CSR Dnya makin tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang rendah.
23. Huafang dan Jianguo (2007) perusahaan yang efek pengungkit keuangan tinggi akan berimbas pada peningkatan atas biaya pengawasan. Oleh karena itu, pihak manajemen pada perusahaan tersebut cenderung lebih aktif untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial untuk mengurangi biaya pengawasan.
24. Camfferman & Cooke (2002) bahwa perusahaan yang jauh lebih tua atau lebih matang dalam hal usia, cenderung akan melakukan improvisasi terhadap cara CSR D dari waktu ke waktu jika dibandingkan dengan perusahaan yang jauh lebih muda dalam hal usia.
25. Penelitian yang dilakukan oleh Khodadi *et al.* (2010), Khlif (2010), Uwuigbe & Egbide (2012), dan Khasharmeh & Desoky (2013) meneliti tentang CSR D dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan audit, hasil penelitian menunjukkan berpengaruh signifikan positif.

Adapun hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah:

- H1= Komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap CSR D.
- H2= Kepemilikan individual keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap CSR D.
- H3= Kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap CSR D.
- H4= Komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap CSR D.
- H5= Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap CSR D.
- H6= Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap CSR D.
- H7= Margin kontribusi berpengaruh signifikan positif terhadap CSR D.
- H8= Likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap CSR D.
- H9= Efek pengungkit keuangan berpengaruh signifikan positif terhadap CSR D.
- H10= Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap CSR D.
- H11= Ukuran perusahaan audit berpengaruh signifikan positif terhadap CSR D.

Gambar 1

Model Analisis Pengaruh Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan terhadap CSR D pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI



Sumber: Alsaeed (2006), Rouf (2011) serta Naser dan Hassan (2013)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dasar, yaitu penelitian yang bertujuan untuk untuk mengembangkan dan mengevaluasi konsep-konsep teoritis (Indriantoro & Supomo, 2009). Ditinjau dari karakteristik masalah, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif, yaitu penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa (Indriantoro & Supomo, 2009). Adapun tujuan penelitian ini adalah menguji hipotesis tentang ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara berbagai variabel terhadap CSRD perusahaan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan. Data tersebut berupa laporan tahunan perusahaan dan data nilai pasar yang terdaftar di BEI dengan periode 2009-2013. Data-data berupa laporan tahunan perusahaan diperoleh dari laman www.idx.co.id. Sampel yang terpilih harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

- Perusahaan yang telah terbuka atau *go-public* yang terdaftar di BEI, tidak termasuk perusahaan dengan kategori finansial.
- Perusahaan terbuka yang telah menerbitkan laporan keuangan, laporan tahunan secara berturut-turut selama 5 tahun yaitu dari tahun 2009-2013.
- Perusahaan yang memiliki data atau informasi keuangan untuk mengukur semua variabel pada penelitian ini yang diperoleh dari laporan keuangan, laporan tahunan.

Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini :

1. Komisaris Independen

Menurut Rouf (2011) bahwa kekuatan dalam mekanisme tata kelola perusahaan sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah komisaris independen didalam sebuah perusahaan. Pengukuran variabel ini dapat dilakukan dengan cara menghitung jumlah persentase komisaris yang independen di dalam dewan direksi.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}}$$

2. Kepemilikan individual

Menurut Alsaeed (2006), pengukuran variabel kepemilikan individual dapat dihitung dengan cara menghitung persentase kepemilikan individual atas saham yang beredar di perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Individual} = \frac{\text{Jumlah saham dimiliki individual}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

3. Kepemilikan pemerintah

Menurut Ghazali (2007) bahwa unsur kepemilikan pemerintah dalam sebuah perusahaan akan membawa dampak terhadap pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh perusahaan, khususnya dalam hal memberikan dampak pada CSRD. Naser *et al.* (2013) menjelaskan bahwa untuk mengukur kepemilikan pemerintah dilakukan dengan cara

menghitung jumlah persentase kepemilikan saham pemerintah dibagi dengan jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan.

$$\text{Kepemilikan Pemerintah} = \frac{\text{Jumlah saham dimiliki pemerintah}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

4. Komite audit

Menurut Rouf (2011), pengukuran variabel komite audit dapat dihitung dengan cara menggunakan variabel *dummy* dimana diberi nilai 1 jika terdapat dewan komite audit pada perusahaan dan diberi nilai 0 jika tidak terdapat dewan komite audit.

5. Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur tingkat CSR. Penelitian Rouf (2011) meneliti bahwa ukuran perusahaan dapat diukur dengan beberapa pendekatan seperti tingkat perputaran penjualan dan total aset dalam perusahaan. Menurut Shubiri *et al.* (2012) ukuran perusahaan dapat diukur dengan mengambil nilai dari total aset pada perusahaan tersebut.

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log dari total asset}$$

6. Profitabilitas

Menurut Alsaeed (2006), pengukuran variabel profitabilitas dapat dihitung dengan cara menghitung persentase kepemilikan individual atas saham yang beredar di perusahaan.

$$\text{Profitabilitas} = \frac{\text{Total laba bersih}}{\text{Total modal}} \times 100\%$$

7. Margin Kontribusi

Wallace *et al.* (1994) kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi, informasi tentang kinerja perusahaan sangat dibutuhkan oleh investor dalam hal pengambilan keputusan. Menurut Alsaeed (2006) rasio margin kontribusi dapat diukur dengan cara :

$$\text{Margin kontribusi} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total penjualan}} \times 100\%$$

8. Likuiditas

Menurut Alsaeed (2006) likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimiliki. Pengukuran likuiditas dapat dilakukan dengan :

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Total aset lancar}}{\text{Total kewajiban lancar}} \times 100\%$$

9. Efek Pengungkit Keuangan

Rasio yang sering digunakan perusahaan untuk mengukur proporsi total aset yang dibiayai oleh kreditor adalah efek pengungkit keuangan. Menurut Gitman (2007), efek pengungkit keuangan adalah pendanaan perusahaan yang dibiayai oleh hutang dari pihak ketiga. Penelitian Alsaeed (2006), pengukuran atas variabel efek pengungkit keuangan adalah :

$$\text{Efek pengungkit keuangan} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

10. Umur Perusahaan

Menurut Lucyanda dan Siagian (2012), umur perusahaan akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam berkelanjutan hidup di dunia bisnis. Ukuran umur perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan *log* dari total umur perusahaan (Alsaeed, 2006).

$$\text{Umur Perusahaan} = \text{Log}_{10} (\text{Tahun observasi} - \text{tahun pendirian})$$

11. Ukuran perusahaan audit

Menurut Alsaeed (2006), pengukuran variabel ukuran perusahaan audit dapat dihitung dengan diberi nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big Four dan diberi nilai 0 apabila perusahaan diaudit oleh KAP non Big Four. KAP Big Four terdiri dari Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, dan KPMG (Alsaeed, 2006).

12. CSRD

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penungkapan CSR. Variabel pengungkapan CSR ini diukur dengan proksi CSRDI (*corporate social responsibility disclosure index*) berdasarkan indikator ISO 26000.

$$\text{CSRDI} = \frac{\text{Total n ISO 26000}}{37 \text{ item ISO 26000}} \times 100\%$$

n : *Dummy* variabel 1 jika item diungkapkan, 0 jika item tidak diungkapkan.

Sesuai dengan tujuan penelitian, metode analisis data yang akan digunakan adalah Analisis Regresi Panel karena penelitian bermaksud menyelidiki hubungan antara variabel independen dengan variabel dependet pada data *longitudinal* (gabungan antara *data cross sectional* dengan *data time series*). Aplikasi lunak yang akan digunakan adalah program *Eviews 7* serta *Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21*. Langkah-langkah analisis data meliputi Statistika Deskriptif, Uji *Outlier*, Pemilihan model terbaik dengan Uji Chow dan Uji Hausman, Uji F, Uji t dan Uji koefisien determinasi.

Regresi Panel

Salah satu bentuk struktur data yang sering digunakan dalam studi ekonometrika adalah data panel. *Data panel* atau *pooled data* atau *longitudinal data* merupakan kombinasi dari *data time series* dan *cross section*. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel *cross section* maupun *time series*, *data panel* memiliki keunggulan terutama karena bersifat *robust* terhadap beberapa pelanggaran asumsi Gauss Markov (Asumsi klasik analisis regresi). Pemodelan antara variabel bebas terhadap variabel terikat pada *data panel* disebut dengan Regresi Panel (Ariefianto, 2012).

Ada tiga metode yang dapat digunakan pada regresi panel, sebagai berikut:

1. **Pooled Least Square (PLS)** yaitu mengestimasi *data panel* dengan asumsi bahwa *error* regresi bersifat konstan tidak terpengaruh waktu maupun objek. Teknik ini efektif untuk meningkatkan presisi jika kita dapat mengasumsikan bahwa hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas adalah konstan pada periode dan objek yang digunakan pada analisis.

2. **Fixed Effect Model (FEM)** mengestimasi *data panel* dengan asumsi bahwa *error* regresi terpengaruh perbedaan objek (individu) maupun waktu dan bersifat tetap.
3. **Random Effect Model (REM)** Mengestimasi *data panel* dengan asumsi bahwa *error* regresi terpengaruh perbedaan objek (individu) maupun waktu dan bersifat *random*.

Uji Chow

Chow digunakan untuk memilih antara metode OLS tanpa variabel dummy atau FEM. Suatu model regresi panel dengan FEM dikatakan layak untuk digunakan dalam memprediksi variabel dependen, apabila nilai probabilitasnya kurang dari α (taraf signifikansi). Jika angka signifikansi lebih dari atau sama dengan α maka model teknik regresi data panel dengan PLS (Ariefianto, 2012).

Uji Hausman

Uji Hausman didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah model FEM atau REM yang paling tepat digunakan. Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistic Chi Square dengan ketentuan Jika nilai probabilitasnya kurang dari α maka model yang tepat adalah model FEM sedangkan sebaliknya bila nilai probabilitasnya lebih dari α maka model yang tepat adalah model REM.

Model Regresi CSRD

$$\text{CSRD} = a + b_1 \text{INCOM}_{it} + b_2 \text{INDV}_{it} + b_3 \text{GOV}_{it} + b_4 \text{AUCO}_{it} + b_5 \text{SIZE}_{it} + b_6 \text{PROF}_{it} + b_7 \text{MARN}_{it} + b_8 \text{LQS}_{it} + b_9 \text{LEV}_{it} + b_{10} \text{AGE}_{it} + b_{11} \text{BIGF}_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

CSRD	: Pengungkapan tanggung jawab sosial
a	: Konstanta
b	: Koefisien regresi independen
INCOM	: Komisaris independen
INDV	: Kepemilikan individual
GOV	: Kepemilikan pemerintah
AUCO	: Komite audit
SIZE	: Ukuran perusahaan
PROF	: Profitabilitas
MARN	: Margin kontribusi
LQS	: Likuiditas
LEV	: Efek pengungkit keuangan
AGE	: Umur perusahaan
BIGF	: Ukuran perusahaan audit
e	: Error
<i>i</i>	: entitas ke- <i>i</i>
<i>t</i>	: periode ke- <i>t</i>

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan manufaktur atau non-finansial yang terdaftar di BEI. Data penelitian yang dikumpulkan adalah laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan tahunan perusahaan. Berikut data sampel yang dapat digunakan dari keseluruhan jumlah perusahaan.

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Dev
CSRD	998	0,0270	0,7297	0,3019	0,1422
Komisarisind	998	0,2000	0,8571	0,4086	0,1184
Milikinvidu	998	0,0000	0,8944	0,0250	0,0866
Milikpemerintah	998	0,0000	0,9003	0,0320	0,1435
Ukuranperusahaan	998	7,9515	14,3304	12,1879	0,7829
Profitabilitas	998	-22,1643	215,0652	0,7475	10,5342
Marginkontribusi	998	-5,82E+10	4,85E+10	-2,29E+7	2,42E+9
Likuiditas	998	0,0194	247,4441	3,2713	12,4056
Efekpengungkitkeu	998	0,0039	6,4990	0,5575	0,4795
Umurpersh	998	8,5222	128,0000	33,5469	16,4643

Sumber: Data sekunder diolah (2014).

Jumlah 484 perusahaan yang terdaftar di BEI terdapat 172 perusahaan yang kategori finansial dan 101 perusahaan tidak mempunyai data yang dibutuhkan untuk menghitung variabel penelitian serta tidak mempunyai laporan tahunan secara berturut-turut selama 5 tahun yaitu 2009-2013. Perusahaan yang dijadikan sampel dari penelitian ini sebanyak 211 perusahaan dengan 5 tahun penelitian maka jumlah data sampel tahun sebanyak 1.055 data.

Tabel 1 diatas menggambarkan bahwa CSRD memiliki nilai rata-rata dari 30,19%. Hasil tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan negara jiran Malaysia yaitu sebesar 52,47% (Rahman *et al.* 2011). Hasil rendah diakibatkan karena adanya ketidakkonsistensian payung hukum di Indonesia (Daniri, 2006).

Nilai tengah dari variabel komisaris independen adalah 0,4086, artinya rata-rata perusahaan di BEI memiliki 40,86% komisaris independen yang ada di dalam daftar komisaris dan direksi, hal ini membuktikan bahwa perusahaan yang terdaftar di BEI telah mengikuti pedoman BAPEPAM-LK bahwa Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki minimal empat anggota dewan (UU NO. 40 Tahun 2007) dan memiliki sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris adalah komisaris independen (Pedoman tentang Komisaris Independen, 2004).

Variabel independen dari kepemilikan individual memiliki nilai tengah 0,0250 artinya perusahaan-perusahaan di BEI rata-rata memiliki 2,50% saham yang dimiliki oleh inividual. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan rata-rata perusahaan di Indonesia masih terkonsentrasi pada kalangan korporasi lokal, korporasi asing dan pemerintah. Data standar deviasi yang melebihi dari 50% dari rata-rata jumlah kepemilikan individual membuktikan bahwa sebaran data pada variabel jumlah subsidiari mengalami hasil yang signifikan.

Penelitian deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata kepemilikan pemerintah sebesar 0,0320. Hasil tersebut tidak tergolong kecil karena dari 484 perusahaan yang terdaftar di BEI, jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di hanya berjumlah 20 perusahaan. Nilai 3,2% adalah nilai yang dimiliki oleh pemerintah dari keseluruhan 100% milik semua pihak. Dua puluh BUMN yang telah terdaftar di BEI telah memenuhi UU No.

45 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2, yang menjelaskan bahwa setiap perusahaan yang dimiliki oleh negara wajib minimal menguasai 51% kepemilikan sebuah perusahaan di BUMN.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa variabel independen ukuran perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki nilai rata-rata dari ukuran perusahaan di Indonesia tergolong cukup besar yaitu senilai 12,1879 karena nilai tersebut melebihi syarat yang telah ditentukan oleh BEI yaitu minimal sebesar 100 miliar rupiah.

Hasil penelitian

Hasil pengujian *outlier* terhadap dependen CSRD terdapat 57 data yang nilainya menyimpang dari nilai SDR yang lebih dari 1,960 dan kurang dari 1,960. Data *outlier* tersebut kemudian dikeluarkan dari pengujian dan tidak diikutsertakan dalam pengujian selanjutnya dengan jumlah akhir data sebanyak 998 data.

Penelitian ini menggunakan metode regresi panel yaitu menggunakan data time series dan cross-section. Metode regresi panel menggunakan uji salah satu dari *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan teknik estimasi yang tepat disesuaikan dengan kondisi data. Untuk memilih model yang terbaik maka digunakan uji Chow dan uji Hausman sehingga model yang dihasilkan merupakan model yang paling sesuai.

Hasil penelitian uji chow menunjukkan bahwa *Cross-Section Chi-square* diatas nilai signifikansi 0,05 yaitu 0.0000 sehingga akan dilanjutkan uji Hausman untuk menentukan metode yang terbaik. Pengujian hausman menunjukkan bahwa nilai dari cross-section random dengan nilai signifikansi 0,7389, menunjukkan bahwa nilai tersebut diatas nilai signifikansi 0,05 sehingga akan ditentukan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah REM.

Nilai F yang diperoleh untuk variabel dependen CSRD sebesar 40,69875 dengan tingkat signifikan sebesar 0,0000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen CSRD. Oleh karena itu, model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi faktor yang mempengaruhi CSRD.

Tabel 2
Hasil Uji t

Variabel	t	Prob.	Hasil	Hipotesis
C	-0.31319	0.00000		
Komisarisind	0.07532	0.00800	Sig	Dukung
Milikinvidu	0.10028	0.02670	Sig	Dukung
milikpemerintah	0.33782	0.00000	Sig	Dukung
Komiteaudit	0.04297	0.04090	Sig	Dukung
ukuranperusahaan	0.04752	0.00000	Sig	Dukung
Profitabilitas	0.00162	0.00000	Sig	Dukung
marginkontribusi	0.00000	0.51440	Non Sig	Tidak dukung
Likuiditas	0.00038	0.15460	Non Sig	Tidak dukung

efekpengungkitkeu	-0.01327	0.06280	Non Sig	Tidak dukung
Umurpersh	0.00085	0.00040	Sig	Dukung
ukuranauditpers	0.02979	0.00020	Sig	Dukung

Sumber: Data sekunder diolah (2014).

Pengamatan dari tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa variabel komisaris independen, kepemilikan individual, kepemilikan pemerintah, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen CSRD karena nilai probabilitas dibawah 0,05. Variabel margin kontribusi, likuiditas dan efek pengungkit keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen karena nilai probabilitas dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin bertambah atau berkurang jumlah komisaris independen dalam perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap CSRD. Hasil penelitian ini didukung oleh Rouf (2011) bahwa kehadiran dari komisaris independen akan mengurangi asimetris informasi antara prinsipal dan agen dengan melakukan pengungkapan yang lebih luas termasuk informasi sosial. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Haniffa dan Cooke (2005) bahwa komisaris independen berfungsi sebagai mekanisme yang mengawasi dan menyeimbangkan tata kelola perusahaan sehingga CSRD juga tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian oleh Eng dan Mak (2003), Huafang dan Jianguo (2007) dan Khan (2010), tetapi penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Barako, Hancock, dan Izan (2006), Khodadadi *et.al* (2010), Ibrahim dan Samad (2011), Haji (2013) dan Rusmanto *et al.* (2014).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan individual signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan serta mendukung hipotesis. Hasil penelitian ini didukung oleh Gelb (2000) bahwa dengan tingkat kepemilikan individual tinggi akan menciptakan ketersediaan informasi investor yang lebih banyak, termasuk informasi sosial, perusahaan cenderung mengungkapkan tanggung jawab sosial lebih besar karena ingin mengeliminasi konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Soliman *et al.* (2012), tetapi hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Roberts (1992), Wallace *et al.* (1994), Alsaeed (2006), Huafang dan Jianguo (2007), Said *et al.* (2009), Gamerschlag (2011), Lucyanda dan Siagian (2012).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan pemerintah signifikan positif terhadap tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan serta mendukung hipotesis. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eng dan Mak (2003) dalam Yee *et al.* (2012) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat kepemilikan pemerintah yang tinggi maka menciptakan konflik kepentingan antara pihak manajemen dan masyarakat yang tinggi serta akan menimbulkan masalah moral sosial yang baru, sehingga dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial lebih maka masalah-masalah tersebut dapat diminimalisir. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh Said, Zainuddin, dan Haron (2009) yang menyatakan bahwa pemerintah selalu melakukan intervensi terhadap perusahaan untuk melakukan kegiatan sosial karena pemerintah adalah simbol dari masyarakat sosial. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Ghazali (2007), Said *et al.* (2009), Haji (2013), tetapi tidak konsisten dengan penelitian oleh Huafang dan Jianguo (2007), Akrouf dan Othman (2013) dan Naser dan Hassan (2013).

Hasil uji nilai variabel komite audit adalah 0,04090. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat CSRD

yang dilakukan oleh perusahaan serta mendukung hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini konsisten dengan Barako *et al.* (2006) yang menyatakan bahwa komite audit adalah sebagai mekanisme untuk mengendalikan dan mengawasi kinerja direksi, termasuk dalam mengawasi kegiatan sosial perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu Rouf (2011), Sweiti dan Attayah (2013), namun tidak mendukung penelitian oleh Said *et al.* (2009), Akhtaruddin *et al.* (2009).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap CSR dan mendukung hipotesis. Hasil penelitian ini konsisten dengan Hackston dan Milne (1996) yang menyebutkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan termasuk kegiatan sosial perusahaan, juga semakin banyak pemegang saham yang mempunyai kepentingan agar perusahaan lebih aktif dalam kegiatan sosial. Ghazali (2007) juga menjelaskan bahwa semakin besar sebuah perusahaan maka tingkat popularitas di mata publik semakin tinggi, sehingga perusahaan cenderung lebih sensitif untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial lebih banyak daripada perusahaan yang kecil. Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis dan konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mia dan Mamun (2011), Setyorini dan Ishak (2012), Galani, Gravas dan Stavropoulos (2011), tetapi penelitian ini juga tidak konsisten dengan penelitian terdahulu yaitu Rouf (2011), Khlif (2010), Ebiringa *et al.* (2013) serta Rusmanto *et al.* (2014).

Nilai dari variabel margin kontribusi terhadap variabel dependen CSR sebesar 0,51440. Nilai probabilitas yang lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa margin kontribusi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CSR dan juga tidak mendukung hipotesis karena arahnya pengaruhnya negatif. Naser dan Hassan (2013) menekankan bahwa pada perusahaan yang memiliki tingkat margin kontribusi tinggi, mereka percaya bahwa laba yang tinggi adalah signal bahwa perusahaan dalam keadaan performa manajemen yang baik serta memberikan rasa aman kepada investor akan penanaman modal investor, sehingga tidak perlu mempromosikan diri dengan cara mengungkapkan tanggung jawab sosial ke publik, sebaliknya perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah bahkan rugi cenderung akan berusaha menyakinkan para pemegang saham dan publik tentang masa depan perusahaan dengan cara mengungkapkan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian tersebut konsisten dengan Belkaoui & Kahl (1987), Camfferman & Cooke (2002) namun tidak sejalan dengan penelitian oleh Wallace *et al.* (1994) dan Alsaeed (2006).

Penelitian dengan menggunakan variabel likuiditas juga membuktikan bahwa nilai dari likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen CSR dan mendukung tidak hipotesis. Menurut Wallace *et al.* (1994) menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi tidak langsung mengarah kepada CSR melainkan meningkatkan nilai perusahaan, peneliti tersebut juga menerangkan bahwa tingkat likuiditas yang rendah semakin membuat perusahaan berusaha untuk menutupi “kelemahan” perusahaan dengan cara mengungkapkan tanggung jawab sosial yang lebih banyak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Wallace *et al.* (1994), Alsaeed (2006) namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Belkaoui & Kahl (1987) dan Camfferman & Cooke (2002).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin bertambah dan berkurangnya tingkat efek pengungkit keuangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap CSR. Hal ini didukung oleh penelitian oleh Belkaoui dan Karpik (1989) menekankan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat efek pengungkit keuangan yang tinggi cenderung akan mengalami pelanggaran atas kontrak kerjasama yang ada, sehingga pihak pucuk manajemen akan berusaha untuk melaporkan keuntungan bersih yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya termasuk pengurangan biaya untuk mengungkapkan tanggung jawab

sosial. Uwuigbe dan Egbide (2012) juga menjelaskan bahwa perusahaan dengan tingkat efek pengungkit keuangan yang tinggi tidak akan bersedia untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis namun konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Uwuigbe & Egbide (2012) dan Akrouf & Othman (2013), tetapi penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian oleh Alsaeed (2006), Rahman *et al.* (2011), Shubiri *et al.* (2012) dan Rusmanto *et al.* (2014).

Variabel independen umur perusahaan berpengaruh signifikan positif dengan dependen karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan mendukung hipotesis. Hasil penelitian didukung oleh Owusu-Asmah (1998) menjelaskan bahwa ada 3 poin yang menyebabkan umur perusahaan berpengaruh signifikan yakni (1) perusahaan yang lebih muda akan cenderung mengalami persaingan tidak adil apabila berusaha mengungkapkan tanggung jawab sosial seperti biaya penelitian dan pengembangan produk (2) biaya yang dikeluarkan untuk proses pengungkapan akan cenderung membebani perusahaan yang umurnya lebih muda (3) perusahaan yang muda cenderung memiliki jejak rekam yang sedikit sehingga hasil pengungkapan kurang optimal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian oleh Roberts (1992), Hossain dan Hammami (2009), Soliman *et al.* (2012), Bayoud dan Kavanagh (2012), Soliman (2013), tetapi hasil ini tidak melaras dengan penelitian oleh Alsaeed (2006), Sofian (2012), Lucyanda dan Siagian (2012) dan Wang *et al.* (2013).

Hasil uji nilai variabel ukuran perusahaan audit adalah 0,0002. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan audit yang digunakan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat CSR yang dilakukan oleh perusahaan serta mendukung hipotesis. Perusahaan yang diaudit oleh perusahaan Big Four cenderung akan membuat berbagai laporan yang bervariasi termasuk laporan CSR (Hossain dan Hammami 2009). Menurut Inchesti (1997) bahwa perusahaan yang ternama cenderung menghasilkan kualitas audit yang baik, sehingga mendorong perusahaan yang diaudit untuk mengungkapkan informasi yang lebih termasuk informasi sosial. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Khodadadi *et al.* (2010), Khelif (2010) serta Uwuigbe dan Egbide (2012), tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian oleh Alsaeed (2006), Janggu *et al.* (2007), Huafang dan Jianguo (2007), Akhtaruddin dan Haron (2010), Khasharmeh dan Desoky (2013), Soliman (2013) serta Naser dan Hassan (2013).

Kesimpulan, dan Implikasi Manajerial

Kesimpulan

1. Mekanisme tata kelola komisaris independen, kepemilikan individual, kepemilikan pemerintah dan komite audit memiliki hasil uji dengan arah positif signifikan yang sesuai dengan hipotesis.
2. Karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan audit menunjukkan arah yang positif, hal ini konsisten dengan arah hipotesis penelitian, namun variabel margin kontribusi dan efek pengungkit keuangan menunjukkan arah yang negatif yang tidak sesuai dengan arah hipotesis penelitian. Akan tetapi hanya 3 variabel saja yang tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan yaitu margin kontribusi, likuiditas serta efek pengungkit keuangan sedangkan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan serta ukuran perusahaan audit menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Implikasi Manajerial

Indonesia sebagai negara *emerging market*, dimana tingkat asimetris informasi antara investor dan manajemen masih dianggap tinggi. Hal ini disebabkan mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia yang kurang baik. Dengan adanya mekanisme tata kelola perusahaan yang baik akan menjalin komunikasi yang efektif antara pihak manajemen dan pemegang saham yang mengurangi informasi asimetris. Mekanisme tata kelola yang baik seperti adanya pihak yang independen untuk menyeimbangkan dan mengawasi kinerja dari direksi/manajemen, adanya evaluasi dan suksesi kinerja pihak manajemen, serta senantiasa menjalankan setiap aktifitas dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Tata kelola yang baik akan meminimalisir konflik antara manajemen dan investor, sehingga terciptanya tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam hal CSRD yang pada akhirnya memberikan dampak secara langsung maupun tidak kepada keberlangsungan hidup sebuah perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa CSRD di Indonesia masih rendah dengan angka rata-rata 30,19%, artinya rata-rata perusahaan di Indonesia hanya mengungkapkan 30,19% dari jumlah poin CSRD menurut pengukuran ISO 26000, kegiatan sosial masih dinilai sebagai formalitas dengan manfaat yang rendah. Namun tata kelola komisaris independen di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap CSRD. Haniffa dan Cooke (2005) menjelaskan bahwa kehadiran komisaris independen pada sebuah perusahaan akan mendorong terjadinya keefektifan kinerja dari dewan komisaris dan direksi, sehingga mampu mendorong pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas termasuk informasi sosial. Patelli dan Prencipe (2007) menjelaskan bahwa komisaris independen sangatlah penting karena wawasan, pengalaman dan independensinya dalam pengawasan kinerja sehingga akan meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara pihak pemegang saham dan pihak manajemen. Kinerja positif dari komisaris independen tidak terlepas dari proses penyeleksian komisaris yang baik. Oleh karena itu, pemegang otoritas di Indonesia diharapkan mampu memperhatikan bagaimana seorang komisaris independen ditunjuk oleh perusahaan dengan membuat regulasi sehingga komisaris independen yang ditunjuk teruji independensinya serta selalu melakukan pengawasan. Cara tersebut dinilai akan menyeleksi komisaris independen yang teruji integritas dan independensinya yang pada akhirnya mampu mendorong kegiatan sosial perusahaan di Indonesia.

Kepemilikan pemerintah dalam sebuah perusahaan akan mendorong tata kelola yang baik, terutama pada kegiatan sosial perusahaan. Pemerintah sebagai simbol dari rakyat akan terus berusaha membangun citra peduli pada rakyat melalui kegiatan sosial, sehingga perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah cenderung lebih aktif dalam kegiatan sosial. Pemerintah disarankan mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan sosial melalui penghargaan (*reward*), perlombaan CSRD (*award*) dan membuat regulasi yang mengatur standar baku pelaporan CSRD, yang berisikan bagaimana seharusnya CSRD dilaporkan di dalam laporan keuangan. Perusahaan di Indonesia yang ingin meningkatkan CSRD dapat melibatkan peran serta pemerintah dalam melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemerintah dapat dilakukan dengan kegiatan bisnis secara bersamaan atau mencari dana dari pemerintah untuk melakukan kegiatan sosial tertentu.

Peran tata kelola komite audit di Indonesia mampu memberikan pengawasan terhadap CSRD. Komite audit diyakini mampu menekan informasi asimetris, mengurangi peluang manajemen dalam berbuat curang, meningkatkan kualitas dari pengungkapan, serta menciptakan pengendalian internal yang jauh lebih baik. Semakin tinggi jumlah komite audit maka tingkat CSRD juga semakin baik. Kinerja baik dari komite audit juga harus

terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Otoritas Indonesia juga dapat memberikan panduan bagi perusahaan dengan membuat kebijakan seperti menciptakan indikator penilaian kinerja bagi komite audit untuk mengimplementasikan mekanisme insentif pada komite audit. Pihak perusahaan juga dapat memberikan kompensasi saham (*stock compensation*) bagi komite audit yang menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, hal ini dinilai penulis mampu meningkatkan CSRD secara lebih luas.

Mekanisme tata kelola kepemilikan individual memberikan pengaruh yang signifikan terhadap CSRD. Pemegang saham individual termasuk masyarakat umum tidak mendapatkan informasi yang lebih banyak jika dibanding dengan pemegang saham mayoritas, institusi maupun asing, sehingga akan meningkatkan informasi asimetris. Hal tersebut akan memicu pihak manajemen untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak termasuk informasi sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban. Implikasi yang dapat disarankan kepada otoritas Indonesia dengan membuat regulasi yang mewajibkan batas minimal jumlah kepemilikan individual termasuk masyarakat umum pada perusahaan serta mempermudah individual atau masyarakat umum untuk memiliki saham pada perusahaan terbuka, yang pada akhirnya akan mendorong perusahaan untuk lebih mengungkapkan informasi sosial yang lebih sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap sosial masyarakat.

Ukuran perusahaan dan umur perusahaan menjadi variabel yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap CSRD. Semakin besar dan lamanya operasional suatu perusahaan cenderung memiliki kemampuan lebih baik dari segi finansial maupun pengalaman dalam menganalisis, mengumpulkan data, serta menjalankan kegiatan sosial. Perusahaan cenderung lebih fokus untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar dan maju daripada mengungkapkan tanggung jawab sosial. Perusahaan yang lebih kecil dan muda disarankan untuk melakukan pembelajaran dan pelatihan dari perusahaan yang lebih berpengalaman dalam pelaksanaan kegiatan sosial.

Profitabilitas adalah kata kunci yang sering digunakan oleh investor untuk menilai kinerja sebuah perusahaan, termasuk kinerja perusahaan dalam hal melakukan kegiatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap CSRD. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan perusahaan mampu mengelola perusahaan dengan baik sehingga mendorong CSRD yang diyakini bermanfaat bagi perusahaan. Namun bagi perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah bahkan merugi, tetapi tetap melakukan kegiatan sosial, otoritas regulasi di Indonesia juga dapat memberikan kemudahan bagi perusahaan berupa insentif pajak serta menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang stabil bagi keberlangsungan perusahaan, sehingga bisnis perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang stabil untuk menopang kegiatan sosial.

Karakteristik terakhir dari penelitian ini yaitu ukuran perusahaan audit. Perusahaan audit yang besar diyakini mampu memberikan prosedur audit dan pengawasan internal yang lebih baik sehingga CSRD dapat dilakukan lebih luas. Perusahaan audit yang besar selalu menggunakan standar audit internasional dalam menjalankan proses pengauditan. Perusahaan yang ingin meningkatkan CSRD disarankan untuk memilih perusahaan audit yang besar atau perusahaan audit ternama yang cenderung mengikuti prosedur internal dan standar pengendalian internasional sehingga CSRD lebih tinggi. Otoritas regulasi di Indonesia juga disarankan untuk memberikan regulasi kepada perusahaan audit untuk melaksanakan kegiatan audit yang mengikuti standar internasional, sehingga membantu perusahaan untuk meningkatkan pengendalian internal yang baik yang akhirnya juga akan meningkatkan CSRD secara tidak langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S.N., Mohamad, N.R., & Mokhtar, M.Z. (2011), Board independence, ownership and CSR of Malaysian large firms. *Corporate Ownership & Control*, 8, (3), pp: 417-435.
- Abu-Baker, N. & Naser, K. (2000). Empirical evidence on corporate social disclosure (CSD) practices in Jordan. *International Journal of Commerce and Management*, 10, (3/4): 18-34.
- Adams, C.A., Hill, W.Y., & Roberts, C.B. (1998). Corporate social reporting practices in western europe: legitimating corporate behavior. *The British Accounting Review*, 30, (1), pp. 1-21.
- Akhtaruddin, M. & Haron, H. (2010). Board ownership, audit committees' effectiveness, and corporate voluntary disclosures. *Asian Review of Accounting*, 18, (3).
- Aktaruddin, M., Hossain, M.A., Hossain, M., Yao, & Lee. (2009). Corporate governance and voluntary disclosure in corporate annual reports of Malaysian listed firms. *The Journal of Applied Management Accounting Research*, 7, (1): 1-20.
- Akrouf, M.M. & Othman, H. B. (2013). A study of the determinants of corporate environmental disclosure in MENA emerging markets. *Journal of Reviews on Global Economics*, 2, 46-59.
- Anggraini, F.R.R. (2006). Pengungkapan informasi sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan keuangan tahunan (studi empiris pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Jakarta). *Symposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.
- Ariefianto (2012). Financial deepening untuk perbankan. *Majalah Info Bank*, 34, pp: 401.
- BAPEPAM (2000). Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: SE-03/PM/2000.
- BAPEPAM (2004). Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-29/PM/2004.
- Barako, D. G., Hancock, P., & Izan, H. Y. (2006). Factors influencing voluntary corporate disclosure by Kenyan companies. *Corporate Governance: An International Review*, 14, pp. 107-125.
- Bayoud, N.S. & Kavanagh, M. (2012). Factors influencing levels of corporate social responsibility disclosure by Libyan firms: a mixed study. *International Journal of Economics and Finance*.
- Belal, A. (2001). Study of corporate social disclosures in Bangladesh study of corporate social disclosures in Bangladesh. *Managerial Auditing Journal*, 16, (5): 274-89.
- Belkaoui, A. & Kahl, A. (1987). Corporate financial disclosure in Canada, *Research Monograph No. 1 of Canadian Certified General Accountants Association, Vancouver*.
- Belkaoui, A. & Karpik, P. G. (1989). Determinants of the corporate decision to disclose social information. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, vol. 2: 1.
- Branco, Castelo, M., & Rodrigues, L. L. (2008). Factors influencing social responsibility disclosure by Portuguese companies. *Journal of Business Ethics*, 83, pp: 685-701.
- Camfferman, K. & Cooke, T. (2002). An analysis of disclosure in the annual reports of UK and Dutch companies. *Journal of International Accounting*, pp: 1-28.
- Chau & Gray. (2010). Family ownership, board independence and voluntary disclosure: evidence from Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 19, (2), p: 93.
- Chen, J.P., Charles, & Jaggi, B. L. (2000). The Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19 (4-5), pp: 285-310.

- Cheng, E.C.M. & Courtenay, S.M. (2006). Board composition, regulatory regime and voluntary disclosure. *The International Journal of Accounting*, 41, pp: 262-289.
- Choi, F.D.S. (1973). Financial disclosure and entry to the European capital market. *Journal of Accounting Research*, 11, (2), pp: 159-175.
- Chow, C. & Wong-Borne, A. (1987). Voluntary financial disclosure by Mexican corporations. *The Accounting Review*, 3, pp: 533-41.
- Cooke, T.E. (1989). Voluntary corporate disclosure by Swedish companies. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 2, pp: 113-24.
- Daniri, A (2006). *Konsep dan Penerapan Good Corporate Governance dalam Konteks Indonesia*. Jakarta : Ray Indonesia.
- Ebiringa, O, T., Yadirichukwu, E., Chigbu, E.E., & Ogochukwu, O.J. (2013). Effect of firm size and profitability on corporate social disclosures: The Nigerian oil and gas sector in focus. *British Journal of Economics, Management & Trade*, 3, (4), pp: 563-574.
- Eng, L. & Mak, Y. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22, pp: 325-345.
- Ernst & Ernst (1978). *Social responsibility disclosure. 1978 Survey*, Ernst and Ernst, Cleveland, OH.
- Fama, E. & Jensen, M. (1983). Separation of ownership and control. *The Journal of Law & Economics*, 25, (2), pp: 301-25.
- Fraser, B.W. (2005). Corporate social responsibility. *The Internal Auditor*, 62, (1), pp: 42-47.
- Galani, D., Gravas, E., & Stavropoulos A. (2012). Company characteristics and environmental policy. *Business Strategy and the Environment*, 21, pp: 236-247.
- Gamerschlag, R., Moller, K., & Verbeeten, F. (2011). Determinants of voluntary CSR disclosure: empirical evidence from Germany. *Rev Manag Sci*, 5, pp: 233-262.
- Gelb, D.S. (2000). Managerial ownership and accounting disclosures: an empirical study. *Review of Quantitative Finance and Accounting*, 15 (2), pp: 169-85.
- Ghazali, N.A. (2007). Ownership structure and corporate social responsibility disclosure: some Malaysian evidence. Emerald Group Publishing Limited, ISSN 1472-0701.
- Ghozali, I. (2002). *Aplikasi analisis multivarite dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Gitman, L, J. (2007). *Principios de Administración Financiera*. 11va. Ed, Mexico. Ed. Pearson Education, PP: 694.
- Gray, R.H., Owen, D., & Adams, C. (1996). *Accounting and accountability: changes and challenges in corporate social and environmental reporting*. Hemel Hempstead, Prentice Hall.
- Gujarati, D. (2003). *Essentials of econometrics 3rd* . Singapore: Irwin McGraw-Hill.
- Gul, F, & Leung, S. (2004). Board leadership, outside directors expertise and voluntary corporate disclosures. *Journal of Accounting and Public Policy*, 23, pp: 351-379.
- Guthrie, J. & Parker, L.D. (1990). Corporate social disclosure practice: A comparative international analysis. *Advances in Public Interest Accounting*, Vol 3.
- Hackston, D., & Milne, M. J. (1996). Some determinant of social and environment disclosures in New Zealand Company. *Accounting, Audit, and Accountability Journal*, 9, pp: 77-108.
- Haji, A, K. (2006). The association between firm-specific characteristics and disclosure. *Managerial Auditing Journal*, 21 (5), pp: 476-496.
- Haniffa, R., M. & Cooke, T.E. (2005). Cculture, corporate governance and disclosure in malaysian corporations. *Abacus*, 38, (3), pp: 317-349.
- Harahap, S, S (2005). *Teori Akuntansi*. Edisi Lima. Jakarta : PT. Grafindo Perkasa

- Heinze, D. C. (1976). Financial correlates of a social involvement measure. *Akron Business and Economic Review*, 7, pp: 48-51.
- Hendriksen, Eldson & Nugroho (1997). *Teori Akuntansi Jilid 2*, Jakarta : Edisi 4 Erlangga
- Ho, S.S.M, & Wong, K.S. (2001). A study of corporate disclosure practices and effectiveness in Hong Kong. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 12, (1), pp: 75-101.
- Jensen, M.C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control system. *Journal of Finance*, 48, pp: 831-880.
- John R. M. Hand, Holthausen, R, W., & Leftwich, R, W (1989). The effect of bond rating changes on bond and stock prices. Chicago: Center for Research in Security Prices, Graduate School of Business, working paper series, 253.
- Hossain, M, & Hammami, H, (2009). Voluntary disclosure in the annual reports of an emerging country: The case of Qatar. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*. 25, pp: 255–265.
- Huafang, X, & Jiangou, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure. *Managerial Auditing Journal*, 22 (6), pp: 604-619.
- Inchausti, B. (1997), The influence of company characteristics and accounting regulation on information disclosed by spanish firms. *European Accounting Review*, 6, (1), pp: 45-68.
- Indriantoro, N. & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis (edisi kedua)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Islam, M.A., & Deegan, C. (2007). Motivations for an organization within a developing country to report social responsibility information. *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 21, pp: 850-874.
- Janggu, T., Joseph, C., & Madi, N. (2007). The Current State of Corporate Social Responsibility Among Industrial Companies in Malaysia. *Social Responsibility Journal*, 3, (3), pp: 9-8.
- Jensen, M. & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3, pp: 305–360.
- Khan, M, H, U, Z (2010). The effect of corporate governance elements on corporate social responsibility (CSR) reporting. *International Journal of Law and Management*, 52, (2), pp: 82-109.
- Khasharmeh, H, A & Desoky, A, M. (2013). On-line corporate social responsibility disclosures: the case of the gulf cooperation council (GCC) countries. *Global Review of Accounting and Finance*, 4, (2) pp: 39 – 64.
- Khelif, H (2010). The determinants of corporate disclosure: a meta-analysis. *International Journal of Accounting and Information Management*, 18, (3).
- Khodadadi, V., Khazami, S., & Aflatooni, A. (2010). The effect of corporate governance structure on the extent of voluntary disclosure in Iran. *Business Intelligence Journal*, 3, (2).
- Lipunga, A, M. (2015). Corporate social responsibility reporting through the lens of iso 26000: a case of malawian quoted companies. *International Business Research*, 8, (2).
- Lucyanda, J. & Siagian, L, G. (2012). The influence of company characteristics toward corporate social responsibility disclosure. *The 2012 International Conference on Business and Management*.
- Maharani, D. (2012). Analisis pengaruh mekanisme corporate governance perusahaan terhadap pemilihan auditor eksternal. *Skripsi*.
- McClave, J, T. & Sincich, T. (2004). *Statistics: 9th Edition*. Pearson Education International.

- Mia, P, & Mamum, A, A. (2011). Corporate social disclosure during the global financial crisis. *International Journal of Economics and Finance*, 3, (6).
- Misra, S, & Suar, D, (2010). Does Corporate Social Responsibility Influence Firm Performance of Indian Companies? *Journal of Business Ethics*, 95, pp: 571–601.
- Naser, K. & Hassan, Y. (2013). Determinants of corporate social responsibility reporting: evidence from an emerging economy. *Journal of Contemporary Issues in Business Research*.
- Nurkhin, A. (2009). Ccorporate governance dan profitabilitas; Pengaruhnya terhadap CSRD perusahaan (studi empiris pada Perusahaan yang tercatat di bursa efek indonesia). Semarang : Universitas Diponegoro.
- Owusu-Ansah, S. (1998). The impact of corporate attributes on the extent of mandatory disclosure and reporting by listed companies in Zimbabwe. *The International Journal of Accounting*, 33, pp: 605–631.
- Pincus, K., Rusbarsky, M., & Wong, J. (1989). Voluntary formation of corporate audit committees among NASDAQ firms. *Journal of Accounting and Public Policy*, 8, pp: 239–265.
- Putranto, R, J. & Raharja S. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan corporate governance dalam laporan tahunan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2008-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2, (2), pp: 1-12.
- Rahman, N., Zain, M, M. & Al-Haj, N, H, Y, Y. (2011). CSR disclosures and its determinants: evidence from Malaysian government link companies. *Emerald Group Publishing Limited*, 7, (2), pp: 181-201.
- Roberts, R, W (1992). Determinants of corporate social responsibility disclosure: An application of stakeholder theory. *Accounting Organizations and Society*, 17, (6), pp: 595-612.
- Rouf, M, A. (2011). The Corporate Social responsibility Disclosure: A Study of Listed Companies in Bangladesh.
- Rosenstein, S. & Wyatt, J.G. (1990). Outside directors, board independence and shareholder wealth. *Journal of Financial Economics*, 26, pp: 175-92.
- Rusmanto, T, Waworuntu, S, R., & Syahbandiah, V.P (2014). The Impact of Corporate Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from Indonesia. *Handbook on the Emerging Trends in Scientific Research*.
- Said, R, M., Zainuddin, Y, R., & Haron, H. (2009). The relationship between corporate social responsibility disclosure and corporate governance characteristics in Malaysian public listed companies. *Q Emerald Group Publishing Limited*, 5, (2), pp: 212-226.
- Santoso, S. (2012). *Buduk latihan SPSS statistik parametrik*. PT. Elex Media Komputindo Gramedia Jakarta.
- Schermerhorn, J.R. (1993). *Management for productivity* (4th ed.), Canada: John Wiley & Sons, Inc.
- Sembiring. 2005. Karakteristik perusahaan dan CSRD : study empiris pada perusahaan yang tercatat di bursa efek jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi* 8.
- Setyorini, C, T. & Ishak, Z. (2012). Corporate social and environmental disclosure: a positive accounting theory view point. *International Journal of Business and Social Science*, 3, (9).
- Shubiri, F, N., Orabi, M.M.A & Al-abadallat, A,Z. (2012). Financial and non financial determinants of corporate Social responsibility.
- Singhvi, S. S. & Desai, H. (1971). An empirical analysis of the quality of corporate financial disclosure. *The Accounting Review*, 46, pp: 129-138.

- Soliman, M. M (2013). Firm Characteristics and the Extent of Voluntary Disclosure: The Case of Egypt. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4, (17).
- Soliman, M. M, El-Din, M.B., & Sakr, A (2012). Ownership structure and corporate social responsibility (CSR): an empirical study of the listed companies in Egypt. *The International Journal Social Science*. 5, (1).
- Sofian, M, A (2012). The influence of company characteristics toward corporate social responsibility disclosure. *The 2012 International Conference on Business and Management*.
- Sweiti, I, M. & Attayah O, F. (2013). Critical factors influencing voluntary disclosure: the Palestine exchange PEX. *Global Journal of Management and Business Research Finance*.
- Thompson, P. & Zakaria, Z. (2004). Corporate social responsibility reporting in Malaysia progress and prospects. *Journal of Corporate Citizenship* 13 (Spring), pp: 125-136.
- Trotman, K. T., & Bradley, G. W. (1981). Associations between social responsibility disclosure and characteristics of companies. *Accounting, Organisations and Society*, 6, (4), pp: 355–362.
- Tsang, E.K. (1998). A longitudinal study of corporate social reporting in Singapore: the case of the banking, food and beverage and hotel industries. *Accounting Auditing and Accountability Journal*, 11, (5), pp : 624-635.
- Utama, S. (2007). *Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia*.
- Uwuigbe, U & Egbide, B, C. (2012). Corporate Social Responsibility Disclosures in Nigeria: A Study of Listed Financial and Non-Financial Firms. *Journal of Management and Sustainability*. 2, (1).
- Wallace, R. S. O., Naser, K., & Mora, A. (1994). The relationship between the comprehensiveness of corporate annual reports and firm characteristic in Spain. *Accounting & Business Research*, 25, (97), pp: 41-53.
- Wang, J., Song, X, L., & Yao, X, S. (2013). The determinants of corporate social responsibility disclosure: evidence from China. *The Journal of Applied Business Research*, 29, (6).
- Yee, L, S., Yen, L, M., Kian, L,W., Von, O.Y., & Keong, W.C. (2013). Determinants of csr disclosure: a study.